

PROFIL MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. SEJARAH PEMBENTUKAN MUI

Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah tempat musyawarah dari para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim lainnya serta mempunyai tugas sebagai pengayom untuk setiap umat Islam di Indonesia untuk menjawab segala permasalahan umat. Disamping itu, Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mewakili umat Islam dalam pertemuan ulama internasional. Dan Majelis Ulama Indonesia juga merupakan sebuah lembaga yang mempunyai sifat keagamaan dan independen, yang mempunyai terikat dengan pemerintah dan ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia.

Pembentukan MUI sangat erat kaitannya dengan sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu ketika para ulama berjuang untuk mempertahankan Indonesia pada masa revolusi (1945-1949). Dalam periode 1950-1959 yaitu ketika Indonesia menganut system demokrasi parlementer, peranan ulama menjadi sangat berpengaruh karena sebagian besar partai politik berdasarkan asas keagamaan dan dipimpin oleh para pemuka agama.

Di masa pemerintahan presiden Soeharto, peran ulama dibatasi, dan partai politik yang berdasarkan keagamaan dilarang, karena partai politik harus berdasarkan asas Pancasila. Oleh sebab itu, para ulama lebih memilih kembali ke pesantren dan sebagian lagi lebih memilih menjadi seorang mubaligh.¹

¹ Mudzar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Penerjemah Soedarso Soekarno, (Jakarta: INIS, 1993), h. 54.

Dengan berkurangnya peran ulama, maka timbul sebuah gagasan untuk mencari sebuah peranan baru ulama di dalam masyarakat. Melalui konferensi yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam Indonesia (PDII) pada tanggal 30 september – 4 oktober 1970 para ulama mengajukan saran agar dibentuk satu kesatuan kaum muslimin dengan bentuk sebuah majelis bagi para ulama Indonesia mengenai kegiatan sosial untuk memberikan fatwa-fatwa.

Pada tahun 1974 pengajuan ini baru mendapatkan tanggapan ketika PDII mengadakan letak juru dakwah muslim Indonesia. Dalam kegiatan ini, telah disepakati bahwa pembentkan majelis ulama harus berawal di tingkat daerah. Gagasan ini juga mendapat dukungan dari presiden Soeharto pertain ada tanggal 24 mei 1975 bahwa pemerintah menginginkan kaum muslimin untuk bersatu dan persoalan bangsa tidak akan terselesaikan tanpa keikutsertaan peran ulama.

Akhirnya pada tanggal 26 jul 1975 terbentuk sebuah deklarasi oleh 53 peserta mengumumkan terbentuknya Majelis Ulama MUI dan selaku ketua pertama adalah Dr. Hamka²

B. VISI DAN MISI MUI

Visi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita dari sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dcapai di masa depan³. Adapun visi dari

² Mudzar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Penerjemah Soedarso Soekarno, (Jakarta: INIS, 1993), h. 56.

Majelis Ulama Indonesia adalah menciptakan kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik dan memperoleh ridlo dan ampunan Allah SWT serta menuju masyarakat Islam Indonesia yang jaya sebagai implementasi dari Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.⁴

Misi adalah sebuah kalimat yang menyatakan tujuan dari organisasi atau perusahaan. Adapun misi dari Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan sehingga mampu membina umat dalam menanamkan aqidah Islamiyah dan menjalankan syariat Islamiyah.;
2. Melaksanakan dakwah Islam yaitu amar ma'ruf nahi munkar untuk mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas.
3. Menubuhkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam persatuan umat Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁵

C. ASAS SIFAT DAN SUSUNAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Asas Majelis Ulama Indonesia adalah Islam. MUI adalah organisasi yang bersifat keagamaan, kemasyarakatan dan idependen. Independen dalam arti tidak

³ Library.binus.ac.id diakses pada tanggal 8 November 2016 08.00

⁴ Pendoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat : 2011), h. 7

⁵ Pendoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat : 2011), h.7

terikat atau terkait dari pihak manapun. Susunan organisasi dimulai dari tingkat kecamatan hingga pusat. Hubungan antara MUI pusat sampai MUI kecamatan bersifat vertical koordinatif. Susunan MUI secara umum meliputi:

- a. Dewan Penasihat
- b. Dewan Pimpinan Harian
- c. Anggota Pleno, Komisi dan Lembaga.⁶

D. ORIENTASI DAN PERAN MUI

Ada 9 orientasi Majelis Ulama Indonesia yaitu:

1. DINIYAH

Yaitu gerakan Majelis Ulama Indonesia bernuansa “keagamaan” Islam, antara lain bahwa seluruh aspek umat Islam, hendaknya bersifat keagamaan semata.

2. IRSYADIAH

Mengajak berbuat kebajikan, dimanapun Pengurus Majelis Ulama Indonesia bergerak atau melaksanakan tugas keorganisasian/kelambagaan didalam MUI, senantiasa dimaksudkan dari dan untuk berdakwah dalam arti yang luas

3. TARBIYAH

Majelis Ulama Indonesia bersifat responsive dalam menghadapi persoalan keagamaan dan kemasyarakatan (masalah diajukan oleh masyarakat/ dilaksanakan

⁶Pendoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat : 2011), h. 21-22

oleh MUI secara proaktif, hendaknya mampu memberikan jawaban yang tegas dan proposional dan bersemangat dalam berlomba-lomba mencapai kebaikan. Pemecahan persoalan bisa melalui media dakwah, misalkan di majelis taklim, khutbah jum'at dan sebagainya, sehingga masyarakat mendapatkan pencerahan terhadap persoalan yang ada.

4. HURURIYAH

Majelis Ulama Indonesia bebas dari intervensi pemahaman atau pemikiran manapun dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam berfatwa. Majelis Ulama Indonesia memiliki pendirian sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada.

5. TA'AWWUNIYAH

Majelis Ulama Indonesia saling tolong menolong baik untuk muslim ataupun non muslim. Sesuai dengan 3 prinsip yakni; *Islamiyah*, *Wathoniyah*, dan *Basyariyah*. Fungsi ini mencakup lingkungan nasional ataupun internasional.

6. SURIYAH

Majelis Ulama Indonesia bersifat musyawarah dan demokratis dalam berbagai kegiatan internal dan bersifat akomodatif dalam mewadahi berbagai aspirasi dan persoalan yang ada. Karena Majelis Ulama Indonesia merupakan tempat berkumpulnya para *Ulama'*, *Zu'ama*, *Aghniyah*, Pemuka Islam dalam rangka menghadapi persoalan yang dihadapi umat.

7. TASSAMUH

Majelis Ulama Indonesia bersifat toleransi terhadap berbagai pemikiran yang berkembang di dalam masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Dalam mengadakan rapat dengan ormas-ormas Islam mengenai satu permasalahan umat, Majelis Ulama Indonesia mengedepankan sikap saling menghargai perbedaan pendapat agar tidak terjadi 'Ikhtilafiyah' yang tajam antara peserta rapat/musyawarah.

8. QUDWAH

Majelis Ulama Indonesia melakukan sebuah gerakan baru yang belum dilakukan oleh ormas-ormas Islam. Misalnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia wilayah Jawa Timur, mereka melakukan Kajian Islam Hanif (Versi MUI), kegiatan ini bertujuan untuk membentengi umat dari pemikiran-pemikiran yang salah.

9. ADDUALIYAH

Majelis Ulama Indonesia ikut aktif dalam memperjuangkan Umat Islam di tingkat Internasional. Sebagai contoh, MUI diminta memberikan pendapat mengenai terorisme di Amerika dan Mesir.⁷

⁷ Pendoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat : 2011), h. 8-11

Berdasarkan jati diri ulama sebagai *waratsatu al anbiyaa* maka peran dari Majelis Ulama Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Sebagai Ahli Waris Tugas Para Nabi

Sebagai *warasatu al-anbiyaa* Majelis Ulama Indonesia menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam.

2. Sebagai Pemberi Fatwa (Mufti)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa terhadap berbagai persoalan yang ada di dalam umat. Baik diminta ataupun tidak diminta. Majelis Ulama Indonesia bersifat akomodatif terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan umat.

3. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (Ra'iy wa Khadim al ummah)

Majelis Ulama Indonesia melayani umat dalam hal memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan umat. Dan Majelis Ulama Indonesia akan selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

4. Sebagai Penegak Amar Makruf dan Nahyi Munkar

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai penegakan amar makruf nahyi munkar. Menegaskan bahwa kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan Istiqomah.

5. Sebagai Pelopor Gerakan Tajdid

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai gerakan pemurnian dan dinamisasi pemikiran Islam.

6. Sebagai Pelopor Gerakan Perbaikan Umat (Ishlah al Ummah)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor perbaikan umat meliputi:

- a. Sebagai pendamai jikalau ada perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan Umat. Majelis Ulama Indonesia akan menmpuh jalur kompromi dan persesuaian serta mencari hukum yang lebih kuat. Sehingga ukhuwwah dikalangan umat Islam Indonesia akan tetap terjaga.
- b. Sebagai pelopor perbaikan umat Majelis Ulama Indonesia akan membina kehidupan umat terutama dalam akidah, akhlak dan syariah. Serta penguatan dan pemberdayaan kehidupan umat, juga berusaha secara terus menerus dalam menyatukan umat.

7. Sebagai pengemban kepemimpinan umat (Qiyadah al-ummah)

Majelis Ulama Indonesia bertanggung jawab atas maju mundurnya kehidupan bangsa terutama dalam hal; terciptanya keukunan umat beragama, perbaikan akhlak dan bangsa serta pemberdayaan umat segi kehidupan. Oleh karena itu, MUI perlu ikut berperan sebagai pengemban kepemimpinan umat secara kelembagaan.⁸

⁸ Pendoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat : 2011), h. 10-13